

NO ONE LEFT BEHIND

STRATEGI GLOBAL UNTUK
KESEJAHTERAAN YANG INKLUSIF

Oleh
RUDY C TARUMINGKENG



INKLUSI



PENDIDIKAN



KESEHATAN



EKONOMI
BERKELANJUTAN



KEADILAN



LINGKUNGAN
BERKELANJUTAN



PERDAMAIAN



KOLABORASI GLOBAL
MASA DEPAN YANG LEBIH ADIL, SETARA, DAN BERKELANJUTAN
UNTUK SEMUA



Rudy C Tarumingkeng: **No One Left Behind: Strategi Global untuk
Kesejahteraan yang Inklusif**

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

18 April 2026

NO ONE LEFT BEHIND: STRATEGI GLOBAL UNTUK KESEJAHTERAAN YANG INKLUSIF

Abstrak

Gagasan *no one left behind* merupakan janji moral sekaligus agenda kebijakan paling penting dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs). Prinsip ini menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh diukur hanya dari kenaikan produk domestik bruto, pertumbuhan investasi, atau perluasan infrastruktur, melainkan dari sejauh mana kelompok yang paling tertinggal benar-benar memperoleh kesempatan untuk hidup sehat, berpendidikan, aman secara ekonomi, dan bermartabat. Tulisan ini membahas strategi global untuk membangun kesejahteraan yang inklusif dengan menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan. Makalah ini berargumen bahwa kesejahteraan inklusif harus dibangun di atas tujuh pilar utama, yaitu pertumbuhan yang menciptakan pekerjaan bermutu, perlindungan sosial universal, layanan publik dasar yang berkualitas, pendidikan dan inklusi digital, kesetaraan gender dan penguatan ekonomi perawatan, keadilan iklim, serta tata kelola yang partisipatif dan berbasis data. Di tengah kenyataan bahwa hanya sebagian kecil target SDGs yang berada di jalur pencapaian, dunia membutuhkan perubahan dari logika "pertumbuhan dulu, pemerataan nanti" menuju "pertumbuhan yang sejak awal dirancang untuk merangkul." Makalah ini juga menekankan bahwa kebijakan universal perlu dipadukan dengan penargetan yang proporsional bagi kelompok paling rentan, agar prinsip "menjangkau yang tertinggal lebih dahulu" dapat diwujudkan secara nyata. Dengan demikian, *no one left*

behind bukan slogan normatif, melainkan kerangka transformasi ekonomi, sosial, digital, dan ekologis bagi masa depan yang lebih adil. (unsdg.un.org)

Kata kunci: *no one left behind, kesejahteraan inklusif, SDGs, perlindungan sosial, pembangunan manusia, kesenjangan digital, keadilan iklim*

No One Left Behind: Strategi Global untuk Kesejahteraan yang Inklusif

1. Pendahuluan

Dalam sejarah pembangunan global, terdapat satu kecenderungan yang terus berulang: dunia sering merayakan keberhasilan agregat sambil gagal melihat luka pada tingkat manusia. Pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi sebagian pekerja tetap hidup dalam kerentanan. Angka partisipasi sekolah naik, tetapi jutaan anak masih tertinggal. Akses internet meluas, tetapi jurang digital tetap memisahkan wilayah, kelas sosial, dan gender. Karena itu, janji *leave no one behind* muncul bukan sebagai hiasan retorik, melainkan sebagai koreksi terhadap model pembangunan yang terlalu lama menganggap bahwa manfaat pertumbuhan akan “menetes ke bawah” dengan sendirinya. Dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa, prinsip ini menjadi janji sentral dan transformatif dari Agenda 2030. (unsdg.un.org)

Makna terdalam dari prinsip tersebut adalah bahwa pembangunan harus dinilai dari pengalaman mereka yang paling jauh dari pusat kekuasaan dan sumber daya: orang miskin, pekerja informal, perempuan yang menanggung beban perawatan tak dibayar, anak yang hidup di daerah konflik, penyandang disabilitas, masyarakat pedesaan, penduduk kawasan rawan iklim, serta kelompok yang tersingkir karena identitas sosial, etnis, bahasa, atau lokasi geografisnya. Dalam bahasa kebijakan, ini berarti dunia tidak cukup hanya mengejar rata-rata nasional; dunia harus menelusuri

distribusi manfaat, struktur hambatan, dan kualitas akses yang nyata. Di sinilah gagasan kesejahteraan inklusif memperoleh relevansinya: kesejahteraan bukan sekadar pendapatan, melainkan kemampuan manusia untuk menjalani kehidupan yang bernilai. (unsdg.un.org)

Urgensi tema ini semakin tajam karena laporan resmi PBB menunjukkan bahwa kemajuan global menuju SDGs berjalan jauh dari memadai. Laporan SDGs 2024 menyebut hanya 17 persen target yang berada di jalur pencapaian; hampir separuh menunjukkan kemajuan minimal atau moderat, sedangkan lebih dari sepertiga stagnan atau bahkan mundur. Dampak pandemi, konflik, ketegangan geopolitik, dan krisis iklim telah memperlambat bahkan membalikkan sebagian capaian pembangunan. Fakta ini menunjukkan bahwa masalah dunia bukan kekurangan slogan, melainkan kekurangan strategi yang benar-benar inklusif, tahan guncangan, dan mampu menjangkau mereka yang paling tertinggal.

Makalah ini berupaya menjawab pertanyaan mendasar: bagaimana strategi global untuk mewujudkan kesejahteraan yang inklusif dapat dirancang secara lebih sistematis? Jawaban yang diajukan di sini bertolak dari keyakinan bahwa kesejahteraan inklusif memerlukan perubahan paradigma. Dunia perlu berpindah dari logika sempit yang mengutamakan pertumbuhan agregat menuju logika pembangunan manusia yang memadukan produktivitas, perlindungan, kesetaraan kesempatan, ketahanan sosial, dan keadilan antargenerasi. Dengan demikian, agenda *no one left behind* harus dibaca sebagai proyek etis, ekonomi, sosial, digital, dan ekologis sekaligus.

2. Landasan Konseptual: Dari Pertumbuhan Menuju Kesejahteraan Inklusif

Secara konseptual, kesejahteraan inklusif berangkat dari kritik terhadap pemahaman kesejahteraan yang semata-mata berbasis pendapatan. Pendapatan memang penting, tetapi tidak pernah cukup. Dua orang dengan pendapatan yang sama dapat memiliki peluang hidup yang sangat berbeda apabila yang satu hidup dekat fasilitas kesehatan, memiliki

jaringan perlindungan sosial, dan mengakses pendidikan bermutu, sementara yang lain tinggal di wilayah rawan bencana, bekerja informal, dan tidak terlindungi oleh institusi dasar. Karena itu, kesejahteraan perlu dipahami sebagai gabungan antara hasil ekonomi, kualitas institusi, akses layanan publik, serta kebebasan riil untuk berkembang. Gagasan ini sejalan dengan tradisi pembangunan manusia yang menekankan pilihan, kebebasan, dan kemampuan manusia untuk menjalani hidup yang bernilai. ([Human Development Reports](#))

Dalam konteks pembangunan global, Bank Dunia menegaskan pentingnya pertumbuhan yang lebih cepat sekaligus lebih inklusif. Lembaga ini menunjukkan bahwa pada laju pertumbuhan saat ini, banyak negara akan membutuhkan waktu sangat lama untuk menutup kesenjangan kemakmuran; bahkan bagi negara berpendapatan menengah atas yang tipikal, penutupan *prosperity gap* dapat memerlukan sekitar satu abad apabila pertumbuhan tidak menjadi lebih inklusif. Bank Dunia juga menekankan bahwa negara dapat mencapai tingkat kemakmuran yang sama dengan pertumbuhan yang lebih rendah bila ketimpangan berhasil dikurangi. Dengan kata lain, inklusi bukan penghambat pertumbuhan; justru ia adalah pengungkit efisiensi sosial dari pertumbuhan itu sendiri. ([World Bank](#))

Indikator "pertumbuhan 40 persen terbawah" juga memperkaya pemahaman ini. Bank Dunia mendefinisikan *growth in the bottom 40* sebagai laju pertumbuhan pendapatan atau konsumsi kelompok 40 persen termiskin, dan menjadikannya indikator penting dari pertumbuhan yang inklusif. Pendekatan ini menggeser perhatian dari pertanyaan "apakah ekonomi tumbuh?" menjadi "siapa yang memperoleh manfaat dari pertumbuhan itu?" Dalam kebijakan publik, perubahan pertanyaan ini sangat menentukan. Perekonomian bisa saja tumbuh, tetapi bila kelompok terbawah tertinggal, maka pembangunan secara substantif belum inklusif. ([World Bank](#))

OECD menambahkan dimensi lain yang sangat penting, yaitu hubungan antara ketimpangan hasil dan ketimpangan peluang. Ketimpangan pendapatan dan kekayaan bukan hanya soal distribusi akhir, melainkan juga soal proses sosial yang mempersempit mobilitas sosial. Ketika ketimpangan melebar, akses terhadap pendidikan bermutu, jejaring kerja, kesehatan, perumahan, dan modal produktif cenderung semakin terkonsentrasi. Akibatnya, masyarakat miskin tidak sekadar miskin untuk saat ini, tetapi juga mewariskan kerentanan itu ke generasi berikutnya. Kesejahteraan inklusif karena itu harus mencakup redistribusi peluang, bukan hanya redistribusi pendapatan. ([OECD](#))

Di titik ini, konsep *no one left behind* menjadi jembatan normatif dan operasional. Ia memuat setidaknya tiga prinsip. Pertama, universalisme: setiap orang memiliki hak atas martabat, kesempatan, dan perlindungan dasar. Kedua, sensitivitas terhadap ketimpangan: kelompok yang berbeda memerlukan dukungan yang berbeda. Ketiga, prioritas terhadap yang paling tertinggal: sumber daya kebijakan harus diarahkan lebih dahulu kepada mereka yang menghadapi hambatan berlapis. Dengan demikian, kesejahteraan inklusif tidak identik dengan keseragaman. Justru ia mensyaratkan perlakuan yang adil, yang kadang berarti perlakuan yang berbeda untuk mencapai hasil yang lebih setara.

3. Mengapa Agenda Ini Mendesak?

Kebutuhan akan strategi global yang inklusif tidak lahir dari abstraksi teoritis, melainkan dari kenyataan keras yang masih dihadapi dunia. Menurut proyeksi Bank Dunia, sekitar 622 juta orang masih akan hidup dalam kemiskinan ekstrem pada 2030, dan sekitar 3,4 miliar orang kemungkinan hidup dengan kurang dari 6,85 dolar AS per hari. Proyeksi ini menunjukkan bahwa dunia tidak sedang bergerak cukup cepat menuju penghapusan kemiskinan, terlebih ketika tekanan iklim dan konflik ikut memperburuk kerentanan. Dari sini tampak bahwa kemiskinan bukan sekadar residu dari keterbelakangan, melainkan gejala struktural dari ekonomi global yang belum cukup adil. ([World Bank](#))

Kemiskinan itu sendiri bersifat multidimensional. Laporan *Global Multidimensional Poverty Index 2024* menyebut bahwa 1,1 miliar orang di 112 negara hidup dalam kemiskinan multidimensi, lebih dari separuhnya adalah anak-anak. Deprivasi yang dialami meliputi perumahan yang tidak layak, sanitasi yang buruk, ketiadaan listrik, bahan bakar memasak yang tidak memadai, kekurangan gizi, dan ketidakhadiran di sekolah. Laporan yang sama menunjukkan bahwa kemiskinan multidimensi cenderung jauh lebih tinggi di kawasan yang terdampak konflik, dan kemajuan pengurangan kemiskinan di negara-negara dengan konflik berkepanjangan sering kali stagnan atau berbalik arah. Artinya, agenda inklusi harus membaca kemiskinan bukan hanya sebagai masalah pendapatan rumah tangga, tetapi sebagai gabungan antara kekurangan layanan, kerentanan geografis, dan kerusakan institusional. ([Human Development Reports](#))

Kesenjangan perlindungan sosial juga masih sangat besar. ILO melaporkan bahwa dunia memang telah melewati tonggak penting: untuk pertama kalinya lebih dari separuh penduduk dunia, yakni 52,4 persen, tercakup setidaknya oleh satu manfaat perlindungan sosial. Namun, 47,6 persen lainnya masih tidak terlindungi sama sekali. Ini berarti miliaran manusia tetap menghadapi sakit, kehilangan kerja, disabilitas, usia tua, atau guncangan keluarga tanpa bantalan kelembagaan yang memadai. Dalam masyarakat yang rentan guncangan, ketiadaan perlindungan sosial membuat kemiskinan mudah diwariskan dan krisis kecil cepat berubah menjadi krisis jangka panjang. ([International Labour Organization](#))

Di bidang kesehatan, tantangan serupa terlihat jelas. WHO menyatakan bahwa dunia tidak berada di jalur untuk mencapai *universal health coverage* pada 2030. Pada 2023, sekitar 4,6 miliar orang belum sepenuhnya tercakup layanan kesehatan esensial, dan pada 2022 sekitar 2,1 miliar orang mengalami kesulitan finansial akibat biaya kesehatan, termasuk 1,6 miliar yang hidup dalam kemiskinan atau terdorong lebih dalam ke dalam kemiskinan karena pengeluaran kesehatan dari kantong sendiri. Fakta ini memperlihatkan bahwa ketika kesehatan belum menjadi hak yang efektif,

penyakit mudah berubah menjadi kemiskinan, dan kemiskinan pada gilirannya memperburuk kesehatan. ([World Health Organization](#))

Pendidikan, yang sering disebut sebagai tangga mobilitas sosial, juga belum inklusif. UNESCO pada 2024 melaporkan bahwa 251 juta anak dan kaum muda masih berada di luar sekolah di seluruh dunia. Di negara berpendapatan rendah, sekitar 33 persen anak usia sekolah tidak bersekolah, jauh di atas sekitar 3 persen di negara berpendapatan tinggi. Ketimpangan pembiayaan juga amat lebar: negara berpendapatan rendah hanya membelanjakan sekitar 55 dolar AS per pelajar pada 2022, sedangkan negara berpendapatan tinggi membelanjakan 8.543 dolar AS per pelajar. Ini bukan sekadar perbedaan fiskal; ini adalah perbedaan masa depan. ([UNESCO](#))

Di era ekonomi digital, ketertinggalan baru juga muncul dalam bentuk jurang konektivitas. ITU menyatakan bahwa penggunaan internet terus bertumbuh, tetapi universalitas masih belum tercapai, terutama di kawasan berpendapatan rendah, dan kemajuan dalam menjembatani kesenjangan desa-kota masih terbatas. ITU juga mencatat adanya kesenjangan gender digital: pada 2024, sekitar 70 persen laki-laki menggunakan internet dibanding 65 persen perempuan, yang setara dengan 189 juta lebih banyak laki-laki daripada perempuan yang online. Dalam dunia yang semakin terdigitalisasi, ketertinggalan digital berarti ketertinggalan dalam pendidikan, pekerjaan, layanan publik, dan partisipasi sipil. ([ITU](#))

Krisis iklim memperumit seluruh persoalan tersebut. Bank Dunia menegaskan bahwa perubahan iklim merupakan risiko mendasar bagi upaya pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, dan bahwa satu dari lima orang saat ini berisiko mengalami peristiwa cuaca ekstrem dalam hidupnya yang dapat menimbulkan kemunduran besar bagi mata pencahariannya. UNEP menambahkan bahwa dampak iklim yang semakin intens justru paling keras menghantam masyarakat termiskin, sementara pendanaan adaptasi masih jauh dari cukup. Jadi, tanpa keadilan iklim, slogan inklusi akan runtuh di hadapan kenyataan bahwa kelompok

miskinlah yang paling sedikit menyebabkan krisis, tetapi paling besar menanggung biayanya. ([World Bank](#))

4. Prinsip-Prinsip Dasar Strategi Global yang Inklusif

Strategi global untuk kesejahteraan inklusif harus dimulai dari prinsip *"reach the furthest behind first."* Prinsip ini penting karena ketertinggalan biasanya bersifat berlapis. Seorang anak perempuan di desa terpencil mungkin tidak hanya miskin, tetapi juga jauh dari sekolah, minim akses internet, menghadapi norma gender yang mengekang, dan hidup di wilayah rawan bencana. Bila kebijakan hanya didesain bagi "warga rata-rata", maka anak seperti ini akan terus tertinggal. Kebijakan yang benar harus mengenali lokasi, gender, usia, disabilitas, status pekerjaan, dan tingkat kerentanan iklim sebagai lapisan-lapisan yang saling berkelindan. ([The United Nations in Indonesia](#))

Prinsip kedua adalah universalisme yang dipadukan dengan penargetan proporsional. Layanan dasar seperti kesehatan primer, pendidikan dasar, identitas hukum, air bersih, sanitasi, dan perlindungan sosial dasar semestinya bersifat universal. Namun universalisme tidak boleh dipahami secara naif sebagai distribusi yang seragam. Mereka yang berada di posisi paling lemah memerlukan lebih banyak dukungan, lebih banyak investasi, dan lebih banyak adaptasi kebijakan. Dalam kerangka ini, universalisme menjaga legitimasi sosial dan solidaritas politik, sedangkan penargetan proporsional menjaga keadilan substantif.

Prinsip ketiga adalah pendekatan siklus hidup. Risiko ketertinggalan tidak muncul hanya pada satu fase kehidupan. Kekurangan gizi pada masa kanak-kanak memengaruhi kemampuan belajar; pendidikan yang terputus membatasi kualitas kerja saat dewasa; pekerjaan informal tanpa jaminan sosial memperbesar risiko kemiskinan di usia tua. Karena itu, strategi inklusi harus memikirkan manusia dari lahir hingga lanjut usia. Intervensi yang baik bukan sekadar "membantu yang miskin hari ini", tetapi memutus rantai transmisi antargenerasi dari kekurangan.

Prinsip keempat adalah sensitivitas wilayah dan konteks. Ketimpangan global bukan hanya ketimpangan antarindividu, melainkan juga antarteritori. Daerah pedesaan, pulau kecil, wilayah konflik, kawasan perbatasan, dan zona rawan bencana memerlukan desain kebijakan yang tidak identik dengan pusat-pusat urban. Dalam konteks ini, strategi global perlu cukup universal dalam nilai, tetapi cukup fleksibel dalam penerapan.

Prinsip kelima adalah integrasi antara inklusi sosial dan transformasi ekonomi. Terlalu sering kebijakan sosial diperlakukan sebagai “biaya”, sedangkan kebijakan ekonomi dianggap sebagai “mesin pertumbuhan.” Pemisahan ini keliru. Perlindungan sosial yang baik meningkatkan ketahanan rumah tangga, menjaga konsumsi, memungkinkan investasi pada pendidikan anak, dan membuat pekerja berani mengambil peluang ekonomi baru. Demikian pula pendidikan, kesehatan, dan konektivitas digital bukan sekadar layanan sosial; semuanya adalah fondasi produktivitas.

Prinsip keenam adalah keadilan antargenerasi. Kesejahteraan inklusif tidak bisa dibangun di atas kerusakan ekologis yang akan dibayar oleh generasi mendatang. Karena itu, agenda *no one left behind* harus terhubung dengan transisi hijau yang adil, bukan hanya mitigasi emisi. Pertanyaannya bukan semata bagaimana dunia menjadi lebih hijau, tetapi siapa yang menanggung biaya transisi, siapa yang memperoleh pekerjaan baru, dan siapa yang dilindungi ketika sektor-sektor lama menyusut. ([UNEP - UN Environment Programme](#))

5. Pilar-Pilar Strategi Global untuk Kesejahteraan yang Inklusif

5.1 Pertumbuhan yang Menciptakan Pekerjaan Bermutu

Pertama, strategi global harus menempatkan penciptaan pekerjaan bermutu sebagai pusat. Dunia tidak cukup hanya menciptakan pekerjaan; dunia harus menciptakan pekerjaan yang produktif, aman, dan mampu mengangkat martabat. Banyak negara berhasil menurunkan pengangguran terbuka, tetapi masih menghadapi masalah *working poverty*, informalisasi,

upah rendah, dan kerentanan tanpa jaminan sosial. Karena itu, agenda pertumbuhan perlu diarahkan pada transformasi struktural: diversifikasi ekonomi, industrialisasi cerdas, dukungan UMKM produktif, peningkatan keterampilan, dan infrastruktur yang membuka akses pasar.

Dalam perspektif inklusi, pekerjaan bermutu adalah jembatan utama dari bantuan menuju kemandirian. Namun jembatan ini hanya bekerja bila pasar kerja dirancang lebih adil. Upah layak, perlindungan tenaga kerja, akses pembiayaan produktif, dan pengakuan bagi pekerja informal perlu menjadi bagian dari strategi global. Dunia digital juga harus diperlakukan secara kritis: platform digital dapat membuka peluang, tetapi tanpa regulasi yang tepat ia juga dapat memperluas pekerjaan rapuh.

5.2 Perlindungan Sosial Universal

Kedua, perlindungan sosial universal harus dilihat sebagai fondasi negara kesejahteraan modern, bukan sebagai residu belas kasihan. Data ILO tentang 47,6 persen penduduk dunia yang belum terlindungi menunjukkan bahwa pasar dan keluarga tidak cukup untuk mengelola risiko kehidupan. Perlindungan sosial diperlukan untuk membantu masyarakat menghadapi pengangguran, sakit, disabilitas, kehamilan, pengasuhan anak, dan usia tua. Ia juga penting sebagai instrumen stabilisasi makroekonomi, terutama pada masa krisis. ([International Labour Organization](#))

Dalam praktik global, perlindungan sosial universal dapat dibangun melalui kombinasi *social protection floors* dan skema yang lebih komprehensif. Rantai perlindungan sosial menjamin standar minimum: akses layanan kesehatan esensial, perlindungan pendapatan dasar bagi anak, bagi orang usia kerja yang menghadapi kehilangan pendapatan, dan bagi lansia. Di atasnya, negara dapat membangun jaminan yang lebih luas sesuai kapasitas fiskal. Kuncinya bukan menunggu negara kaya untuk mulai melindungi, melainkan memulai dengan desain yang bertahap, adaptif, dan berkelanjutan.

Secara naratif, bayangkan seorang ibu pekerja informal di kota pesisir. Tanpa perlindungan sosial, sakit singkat saja bisa membuat pendapatannya hilang, anaknya putus sekolah, dan keluarganya terjatuh utang. Tetapi dengan jaminan kesehatan, bantuan pengasuhan anak, dan dukungan pendapatan pada saat krisis, keluarga itu memiliki ruang bernapas. Di sinilah perlindungan sosial bekerja bukan sekadar sebagai transfer tunai, melainkan sebagai pelindung martabat.

5.3 Layanan Dasar Universal dan Berkualitas

Ketiga, layanan dasar universal adalah wajah paling konkret dari negara yang inklusif. WHO menunjukkan betapa mahalannya harga sosial ketika kesehatan tidak dijamin secara efektif. Karena itu, strategi global harus memprioritaskan *primary health care*, tenaga kesehatan yang memadai, pembiayaan publik yang progresif, dan pengurangan pembayaran dari kantong sendiri. Tanpa itu, rumah tangga miskin akan terus menjual aset, memotong konsumsi, dan menarik anak dari sekolah saat penyakit datang. ([World Health Organization](#))

Hal yang sama berlaku bagi pendidikan. Fakta bahwa 251 juta anak dan kaum muda masih di luar sekolah menunjukkan bahwa hak atas pendidikan masih sangat jauh dari universal. Pembiayaan pendidikan, kualitas guru, infrastruktur sekolah, dukungan nutrisi, transportasi, dan keselamatan belajar semuanya harus dipandang sebagai satu ekosistem. Pendidikan yang inklusif juga perlu melampaui akses formal: anak harus belajar dengan kualitas yang memungkinkan mereka berpartisipasi dalam ekonomi dan masyarakat abad ke-21. ([UNESCO](#))

Layanan dasar juga mencakup air bersih, sanitasi, energi yang andal, identitas hukum, dan perumahan layak. Dalam banyak negara berkembang, kegagalan layanan dasar sering kali menjadi sumber terbesar ketimpangan pengalaman hidup. Orang kaya dapat membeli solusi privat; orang miskin tidak. Maka, kualitas layanan publik merupakan ukuran sejati dari inklusivitas negara.

5.4 Pendidikan, Keterampilan, dan Inklusi Digital

Keempat, dunia memerlukan lompatan besar dalam pendidikan dan keterampilan agar transformasi teknologi tidak berubah menjadi mesin eksklusif baru. ITU menunjukkan bahwa akses internet belum universal, jurang desa-kota masih nyata, dan ketimpangan gender digital tetap bertahan. Di era di mana pendidikan, perdagangan, pekerjaan, pelayanan pemerintah, dan bahkan partisipasi demokratis semakin berpindah ke ruang digital, konektivitas telah menjadi bagian dari infrastruktur kesejahteraan. ([ITU](#))

Tetapi inklusi digital lebih dari sekadar menara BTS dan kabel serat optik. Ia mencakup keterjangkauan harga perangkat, literasi digital, keamanan data, kemampuan menggunakan AI secara produktif, serta perlindungan dari eksploitasi dan misinformasi. Strategi global harus melihat internet seperti dunia dahulu melihat listrik: bukan barang mewah, melainkan prasyarat partisipasi modern.

Dalam narasi keseharian, seorang mahasiswa di desa terpencil yang tidak memiliki internet stabil sesungguhnya bukan hanya tertinggal secara teknis; ia tertinggal dalam kompetisi pengetahuan, peluang magang, jaringan profesional, dan akses ke pembelajaran sepanjang hayat. Kesejahteraan inklusif pada abad ke-21 karena itu menuntut demokratisasi akses digital.

5.5 Kesetaraan Gender dan Ekonomi Perawatan

Kelima, tidak ada kesejahteraan inklusif tanpa kesetaraan gender. Ketertinggalan perempuan bukan isu sektoral, melainkan persoalan arsitektur ekonomi dan sosial. Ketika pekerjaan perawatan anak, lansia, dan rumah tangga dipikul secara timpang oleh perempuan, kemampuan mereka untuk bersekolah, bekerja, membangun usaha, atau berpartisipasi dalam politik ikut terbatas. Ketika akses digital perempuan tertinggal, peluang mereka dalam ekonomi masa depan ikut menyempit. ITU mencatat bahwa kesenjangan digital gender global masih nyata, dan UN

Women menegaskan bahwa perempuan masih tertinggal dalam pekerjaan, perlindungan sosial, dan akses terhadap peluang ekonomi baru. ([ITU](#))

Strategi global harus karena itu mengakui ekonomi perawatan sebagai fondasi ekonomi produktif. Investasi pada penitipan anak, kesehatan ibu, cuti keluarga, perlindungan maternitas, layanan lansia, dan transportasi aman bukan semata kebijakan sosial; semuanya adalah kebijakan produktivitas dan partisipasi tenaga kerja. Selain itu, pendidikan STEM untuk perempuan, pelatihan digital, akses ke pembiayaan, dan reformasi norma sosial harus berjalan beriringan.

Di banyak negara, kemiskinan perempuan bukan hasil “pilihan pribadi”, tetapi hasil dari desain sosial yang selama puluhan tahun menganggap kerja perawatan sebagai urusan privat. Kesejahteraan inklusif menuntut koreksi terhadap bias historis ini.

5.6 Keadilan Iklim dan Perlindungan Adaptif

Keenam, strategi global harus menggabungkan kebijakan sosial dengan kebijakan iklim. Bank Dunia dan UNEP sama-sama menunjukkan bahwa dampak iklim semakin mengancam pengurangan kemiskinan, sementara masyarakat termiskinlah yang paling rentan terhadap cuaca ekstrem, gagal panen, banjir, gelombang panas, dan kehilangan mata pencaharian. Artinya, perlindungan sosial abad ke-21 harus bersifat adaptif terhadap iklim. ([World Bank](#))

Perlindungan sosial adaptif dapat berbentuk sistem peringatan dini yang terhubung dengan bantuan tunai darurat, asuransi pertanian yang cerdas, dukungan bagi pekerja yang terdampak transisi energi, dan infrastruktur sosial di wilayah rawan bencana. Di sinilah konsep “transisi yang adil” menjadi penting. Dunia harus bergerak menuju ekonomi rendah karbon, tetapi pekerja di sektor-sektor lama tidak boleh dibiarkan menanggung beban transisi sendirian.

Bayangkan komunitas pesisir yang menggantungkan hidup pada cuaca stabil dan hasil laut yang semakin tidak menentu. Tanpa strategi adaptasi,

perubahan iklim akan menghancurkan pendapatan, memaksa migrasi, dan memperburuk pendidikan anak. Tetapi bila negara dan komunitas internasional menyediakan perlindungan pendapatan, diversifikasi mata pencaharian, pelatihan baru, dan infrastruktur perlindungan pesisir, maka transisi menjadi mungkin tanpa meninggalkan mereka yang rapuh.

5.7 Tata Kelola, Data, dan Partisipasi

Ketujuh, kesejahteraan inklusif memerlukan tata kelola yang cerdas dan partisipatif. Agenda *no one left behind* tidak dapat dijalankan hanya dengan niat baik; ia memerlukan data terpilah, koordinasi antarsektor, kapasitas pemerintah lokal, dan partisipasi masyarakat. Banyak kelompok tertinggal justru tidak terlihat dalam data atau tidak terjangkau oleh sistem administrasi. Karena itu, identitas hukum, registrasi sosial yang baik, statistik yang sensitif gender dan wilayah, serta infrastruktur data publik merupakan bagian penting dari strategi global. (unsdg.un.org)

Namun data saja tidak cukup. Partisipasi warga menentukan apakah kebijakan benar-benar sesuai dengan hambatan nyata yang mereka hadapi. Masyarakat miskin sering kali bukan "objek penerima", melainkan pemilik pengetahuan lokal yang penting bagi desain kebijakan. Pemerintahan yang inklusif karena itu harus membuka ruang deliberasi, akuntabilitas, dan evaluasi bersama.

6. Arsitektur Implementasi Global

Pada tingkat global, strategi *no one left behind* memerlukan pembagian peran yang jelas antara negara, organisasi internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Negara tetap memegang tanggung jawab utama dalam menyediakan layanan dasar, regulasi, dan redistribusi. Organisasi internasional berperan dalam pembiayaan, standar, koordinasi lintas negara, transfer pengetahuan, dan dukungan teknis. Sektor swasta dibutuhkan untuk inovasi, investasi, penciptaan pekerjaan, dan penyediaan teknologi, tetapi harus diikat oleh kerangka akuntabilitas agar orientasi laba tidak menyingkirkan orientasi keadilan. Masyarakat sipil dan

komunitas lokal berperan sebagai pengawas, inovator sosial, dan jembatan dengan kelompok yang sulit dijangkau.

Persoalan pembiayaan menjadi krusial. Dunia tidak kekurangan uang secara absolut; dunia lebih sering kekurangan keberanian politik untuk mengalokasikan uang secara lebih adil. Pembiayaan kesejahteraan inklusif dapat bersumber dari reformasi pajak progresif, pengurangan subsidi yang tidak tepat sasaran, penanganan penghindaran pajak, pembiayaan campuran untuk infrastruktur sosial, dan pembiayaan iklim yang lebih adil. Dalam konteks pendidikan, UNESCO telah memperingatkan bahwa banyak negara masih berbelanja di bawah patokan yang disepakati secara global, sementara beban utang menekan investasi sosial. Ini menunjukkan bahwa keadilan fiskal adalah bagian dari keadilan sosial. ([UNESCO](#))

Di tingkat pengukuran, keberhasilan strategi inklusif tidak cukup dinilai dari PDB. Dunia memerlukan panel indikator yang lebih kaya: pertumbuhan 40 persen terbawah, cakupan perlindungan sosial, cakupan kesehatan universal, angka anak di luar sekolah, keterjangkauan internet, ketimpangan gender digital, kualitas pekerjaan, dan risiko iklim terhadap kelompok rentan. Bila indikator tetap sempit, kebijakan pun akan sempit.

7. Ilustrasi Naratif: Tiga Wajah dari “No One Left Behind”

Untuk melihat makna praktis strategi ini, bayangkan tiga sosok.

Yang pertama adalah Amina, seorang anak perempuan yang tinggal di wilayah yang sering dilanda konflik. Ia tidak miskin hanya karena keluarganya berpendapatan rendah. Ia miskin karena sekolahnya tutup, fasilitas kesehatan jauh, listrik tidak stabil, dan rasa aman nyaris tak ada. Dalam kerangka biasa, bantuan tunai mungkin diberikan sekali waktu. Tetapi dalam kerangka *no one left behind*, Amina harus dilihat secara utuh: ia membutuhkan keamanan, sekolah yang berfungsi, nutrisi, perlindungan keluarga, konektivitas, dan masa depan. Narasi Amina serasi dengan temuan UNDP bahwa kemiskinan multidimensi jauh lebih berat di wilayah yang terdampak konflik. ([Human Development Reports](#))

Yang kedua adalah Carlos, pekerja informal di kota besar. Ia memiliki telepon pintar, tetapi tidak punya jaminan kesehatan yang memadai, tidak terlindungi saat kehilangan pendapatan, dan hidup dari penghasilan yang berubah-ubah. Di permukaan, ia tampak terintegrasi dalam ekonomi modern. Namun satu kecelakaan atau sakit dapat memaksa keluarganya menjual aset dan menghentikan sekolah anak. Dalam konteks ini, kesejahteraan inklusif menuntut integrasi antara kerja, perlindungan sosial, layanan kesehatan, dan regulasi ekonomi digital.

Yang ketiga adalah Siti, petani kecil di daerah rawan banjir dan kekeringan. Ia menghadapi perubahan iklim, harga input yang naik, akses pasar yang lemah, dan literasi digital yang terbatas. Program pembangunan yang hanya berfokus pada produktivitas pertanian mungkin menaikkan hasil sesaat, tetapi tidak cukup bila cuaca ekstrem menghapus seluruh kerja kerasnya. Siti memerlukan kombinasi perlindungan iklim, informasi cuaca, akses pembiayaan, pelatihan, asuransi, dan perlindungan sosial. Narasi ini sesuai dengan peringatan Bank Dunia dan UNEP bahwa dampak iklim mengancam pengurangan kemiskinan dan paling keras menghantam kelompok termiskin. ([World Bank](#))

Dari tiga ilustrasi ini, jelas bahwa *no one left behind* menuntut cara berpikir yang terintegrasi. Ketertinggalan hampir tidak pernah berdiri sendiri.

8. Implikasi bagi Dunia Berkembang, Termasuk Indonesia

Bagi negara-negara berkembang, agenda ini memiliki arti yang sangat penting. Banyak negara masih menghadapi tantangan ganda: harus mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas perlindungan sosial dan layanan publik. Sering kali muncul kesan seolah-olah negara harus memilih salah satu. Padahal pengalaman global menunjukkan bahwa negara yang lebih mampu melindungi warganya justru memiliki fondasi sosial yang lebih kuat untuk pertumbuhan jangka panjang.

Bagi Indonesia dan negara-negara *Global South*, pelajaran utamanya adalah perlunya menghubungkan transformasi ekonomi dengan

pembangunan manusia. Hilirisasi, industrialisasi, digitalisasi, dan transisi energi hanya akan menghasilkan kesejahteraan yang luas bila dirancang bersama peningkatan keterampilan, jaminan sosial, pembiayaan pendidikan, layanan kesehatan primer, dan perlindungan bagi wilayah rentan. Dalam masyarakat kepulauan yang besar dan majemuk, persoalan ketertinggalan wilayah juga sangat menentukan. Karena itu, agenda inklusi harus mempunyai dimensi teritorial yang kuat: pusat tidak boleh menilai keberhasilan hanya dari kota-kota besar.

Selain itu, Indonesia dan negara berkembang lain perlu memandang data dan teknologi sebagai alat inklusi, bukan sekadar alat administrasi. Registri sosial yang baik, identitas digital yang aman, interoperabilitas data layanan publik, dan analitik kebijakan yang sensitif terhadap kelompok rentan dapat memperbaiki sasaran program tanpa jatuh pada pengawasan berlebihan. Teknologi harus memperluas hak warga, bukan menyempitkannya.

9. Penutup

Pada akhirnya, *no one left behind* adalah ujian moral bagi peradaban modern. Dunia telah menghasilkan kekayaan, teknologi, dan pengetahuan dalam skala yang luar biasa, tetapi masih belum menjamin bahwa setiap manusia memiliki akses yang layak terhadap kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pekerjaan bermutu, dan masa depan yang aman dari guncangan iklim. Kegagalan ini bukan semata karena keterbatasan sumber daya, melainkan karena desain institusi dan prioritas politik yang belum cukup berpihak pada yang paling rentan.

Strategi global untuk kesejahteraan yang inklusif karena itu harus bergerak di dua jalur sekaligus. Jalur pertama adalah universalisme: memastikan setiap orang memiliki hak atas fondasi kehidupan yang layak. Jalur kedua adalah keberpihakan yang cerdas: memberi perhatian lebih besar pada mereka yang menghadapi hambatan paling berat. Bila dua jalur ini dipadukan, maka pembangunan tidak lagi sekadar memperbesar angka, melainkan memperluas martabat.

Makalah ini menegaskan bahwa kesejahteraan inklusif memerlukan tujuh pilar: pekerjaan bermutu, perlindungan sosial universal, layanan dasar berkualitas, pendidikan dan konektivitas digital, kesetaraan gender dan ekonomi perawatan, keadilan iklim, serta tata kelola berbasis data dan partisipasi. Seluruh pilar itu tidak dapat berdiri sendiri. Masing-masing saling menguatkan, dan kelemahan pada satu bidang akan mengganggu keseluruhan bangunan inklusi.

Dengan demikian, *no one left behind* seharusnya dibaca bukan sebagai kalimat idealistis yang bagus untuk pidato internasional, melainkan sebagai prinsip desain kebijakan. Dunia yang benar-benar maju bukanlah dunia yang pertumbuhannya tinggi, melainkan dunia yang memastikan bahwa kemajuan itu dapat dirasakan juga oleh mereka yang selama ini hidup di pinggir peta pembangunan. Di situlah ukuran sejati kesejahteraan yang inklusif.

Glosarium

Agenda 2030

Kerangka pembangunan global yang diadopsi negara-negara anggota PBB pada 2015, berisi 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Bottom 40

Empat puluh persen penduduk dengan tingkat pendapatan atau konsumsi terendah; digunakan sebagai salah satu indikator apakah pertumbuhan bersifat inklusif.

Human Development

Pendekatan pembangunan yang menekankan perluasan kebebasan, pilihan, dan kemampuan manusia untuk menjalani kehidupan yang bernilai.

Inclusive Welfare / Kesejahteraan Inklusif

Kondisi ketika manfaat pembangunan ekonomi, sosial, digital, dan ekologis dapat diakses secara adil oleh seluruh kelompok masyarakat, terutama mereka yang paling rentan.

Ketimpangan Peluang

Kesenjangan yang muncul bukan hanya dari hasil akhir, tetapi dari akses yang tidak setara terhadap pendidikan, kesehatan, jaringan, modal, dan institusi.

Leave No One Behind

Prinsip inti SDGs yang menegaskan bahwa pembangunan harus menjangkau semua orang, terutama kelompok yang paling tertinggal.

Multidimensional Poverty

Kemiskinan yang diukur tidak hanya dari pendapatan, tetapi juga dari deprivasi pada kesehatan, pendidikan, dan standar hidup.

Primary Health Care

Pelayanan kesehatan dasar yang menjadi pintu utama sistem kesehatan dan fondasi penting bagi cakupan kesehatan universal.

Shared Prosperity

Konsep pembangunan yang menilai apakah pertumbuhan ekonomi juga meningkatkan kesejahteraan kelompok 40 persen terbawah.

Social Protection Floor

Jaminan perlindungan sosial minimum yang mencakup akses terhadap layanan kesehatan esensial dan dukungan pendapatan dasar bagi kelompok rentan.

Transisi yang Adil

Pendekatan menuju ekonomi hijau yang memastikan pekerja dan komunitas yang terdampak perubahan struktural tidak ditinggalkan.

Universal Health Coverage (UHC)

Keadaan ketika semua orang memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan.

Daftar Pustaka (APA 7)

International Labour Organization. (2024). *World Social Protection Report 2024–26: In figures*. ([International Labour Organization](#))

International Telecommunication Union. (2024). *Facts and figures 2024*. ([ITU](#))

International Telecommunication Union. (2024, November 10). *The gender digital divide*. ([ITU](#))

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). *Income and wealth inequalities: Society at a glance 2024*. ([OECD](#))

United Nations Development Programme. (2024). *2024 Global Multidimensional Poverty Index (MPI)*. ([Human Development Reports](#))

United Nations Development Programme. (2025). *Human Development Report 2025*. ([Human Development Reports](#))

United Nations Environment Programme. (2024). *Adaptation Gap Report 2024*. ([UNEP - UN Environment Programme](#))

United Nations Statistics Division. (2024). *The Sustainable Development Goals Report 2024*. ([UNSD](#))

United Nations Sustainable Development Group. (n.d.). *Leave no one behind*. (unsdg.un.org)

UNESCO. (2024, October 31). *251M children and youth still out of school, despite decades of progress (UNESCO report)*. ([UNESCO](https://www.unesco.org))

UN Women. (2025). *Progress on the Sustainable Development Goals: The Gender Snapshot 2025*. ([UN Women](https://www.unwomen.org))

World Bank. (2024). *Poverty, Prosperity, and Planet Report 2024*. ([World Bank](https://www.worldbank.org))

World Bank. (2025). *Growth of the Bottom 40: Monitoring inclusive growth*. ([World Bank](https://www.worldbank.org))

World Health Organization. (2025). *Universal health coverage (UHC)*. ([World Health Organization](https://www.who.int))

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 18 April 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](https://chatgpt.com/c/69e37d13-089c-8398-940b-27e15276b370))

<https://chatgpt.com/c/69e37d13-089c-8398-940b-27e15276b370>